

BAB II

DINAMIKA KETAHANAN PANGAN DAN KRISIS PANGAN DI KOREA UTARA TAHUN 1990- 2024

Bab II menjadi penting untuk memberikan gambaran umum terkait dengan variabel yang menjadi subjek penelitian. Konteks yang digambarkan pada bab ini tersusun dari empat bagian sebagai berikut: (1) Penulis terlebih dahulu mengulas secara mendalam mengenai dinamika ketahanan pangan dan krisis pangan di Korea Utara sejak tahun 1990-an. Bab ini menjelaskan fenomena Arduous March, yaitu periode kelaparan besar yang terjadi di Korea Utara akibat kegagalan ekonomi, bencana alam, dan perubahan politik global, termasuk runtuhnya Uni Soviet yang sebelumnya menjadi sumber utama bantuan bagi Korea Utara. (2) Pembahasan spesifik mengenai anggaran dan pendanaan ketahanan pangan Korea Utara. Bab ini menyoroti ketimpangan alokasi anggaran negara, di mana belanja militer Korea Utara jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk ketahanan pangan. Rezim Kim Jong Un tetap mengalokasikan lebih dari 36% PDB untuk belanja pertahanan, sementara sebagian besar masyarakat masih mengalami kelaparan dan bergantung pada pasar informal untuk bertahan hidup. (3) Pembahasan mengenai dampak krisis pangan terhadap kehidupan masyarakat Korea Utara. Krisis ini menyebabkan peningkatan angka malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak, serta memperburuk standar hidup penduduknya. Isolasi politik, sanksi internasional, serta keterbatasan produksi pertanian semakin

memperparah kondisi sosial-ekonomi negara ini. (4) Penjelasan mengenai strategi Korea Utara dalam menjaga ketahanan pangan yaitu strategi domestik Korea Utara dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk kebijakan dan peran pemerintah serta militer dalam distribusi pangan

2.1. Kelaparan Besar atau Fenomena *Arduous March* di Korea Utara

Fenomena Kelaparan Besar merupakan krisis kelaparan yang masih melanda Korea Utara saat ini. Adapun julukan yang melekat yang dikenal sebagai *Arduous March*, dimana istilah ini adalah periode kelaparan yang signifikan di Korea Utara selama pertengahan hingga akhir tahun 1990-an yang melanda negara tersebut dengan peristiwa bencana alam, krisis ekonomi dan kegagalan politik pada masa itu. Namun, periode tersebut terus mempengaruhi kehidupan warga Korea Utara hingga saat ini karena kerawanan yang terjadi tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Krisis tersebut tidak lepas dari sejarah terbentuknya negara dan bagaimana linimasa peristiwa membentuk tantangan tersebut. Kelaparan Besar, atau yang dikenal sebagai *Arduous March*, merupakan krisis kemanusiaan yang mendalam di Korea Utara. Krisis ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari serangkaian peristiwa sejarah, politik, dan ekonomi yang saling terkait. Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) didirikan pada 9 September 1948 di bawah kepemimpinan Kim Il-sung dengan cita-cita negara komunis (Lankov, 2013). Pada tahun-tahun awalnya, DPRK sangat bergantung pada Uni

Soviet untuk dukungan ekonomi, termasuk makanan, mesin, dan keahlian teknis (Smith, 2015). Bantuan ini krusial untuk membangun basis industri dan infrastruktur Korea Utara yang mengadopsi model ekonomi komando ala Soviet (Lankov, 2013). Walaupun pemerintah menggaungkan ideologi Juche (kemandirian), kenyataannya bantuan eksternal, terutama untuk sektor pertanian dan industri berat, sangat vital (Haggard & Noland, 2007).

Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev mulai mengurangi bantuan ke Korea Utara, sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan yang ekonominya berkembang pesat (Lankov, 2013). Pada tahun 1988, Uni Soviet masih menyumbang sekitar 60% dari total perdagangan luar negeri Korea Utara (Haggard & Noland, 2007). Namun, situasi berubah drastis ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Subsidi energi, khususnya minyak bumi, anjlok dari 506.000 metrik ton pada tahun 1989 menjadi hanya 30.000 metrik ton pada tahun 1992 (Lee, 2001). Hilangnya pasokan energi ini melumpuhkan sektor pertanian dan industri yang bergantung pada bahan bakar untuk irigasi, transportasi, dan produksi (Demick, 2009).

Kematian Kim Il-sung pada 8 Juli 1994 menambah ketidakpastian di Korea Utara. Banyak warga yang menyadari bahwa tahun-tahun mendatang akan diwarnai kelaparan dan kemiskinan parah (Crossing Borders NK, 2019). Krisis ini diperparah oleh sistem pertanian kolektif yang tidak efisien, di mana pemerintah lebih mengutamakan pertanian

yang dikelola negara dan kuota yang kaku daripada kebutuhan riil di lapangan (Smith, 2015). Ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia, yang awalnya dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan hasil panen, justru merusak lahan pertanian (Crossing Borders NK, 2019). Seperti yang dicatat oleh Andrew Natsios dalam bukunya, "The Great North Korean Famine," para agronom internasional yang mempelajari praktik pertanian Korea Utara terkejut dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Mereka melaporkan bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menerapkan pendekatan ekstrem semacam itu. Apa yang awalnya tampak sebagai kisah sukses pertanian berubah menjadi bencana lingkungan.

Perubahan iklim juga memainkan peran penting. Peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur (FAO, 2021). Pola curah hujan yang tidak stabil dan peningkatan suhu global mengurangi produktivitas lahan yang sudah bermasalah (FAO, 2021). Sistem pertanian Korea Utara yang tradisional dan bergantung pada input eksternal (pupuk dan bahan bakar) yang terbatas akibat sanksi internasional, semakin memperburuk keadaan (FAO, 2021).



**Gambar 2.1. Lahan Pertanian yang Gersang di daerah Pyongyang
Akibat Perubahan Cuaca Ekstrem di tahun 1990an**

Sumber: (Ben Davies, 1995)

Pada tahun 1995, banjir hebat menghancurkan tanaman dan infrastruktur pertanian, diikuti oleh kekeringan pada tahun 1996 (Noland, 2007). Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memperparah situasi, membuat Korea Utara tidak mampu mengimpor pangan dan sumber daya yang diperlukan (WFP, 2000). Pada bulan September 1995, perwakilan diplomat Korea Utara mengajukan permohonan bantuan kepada Program Pangan Dunia (WFP), sebuah tindakan yang mengejutkan karena warga Korea Utara sendiri belum menyadari sepenuhnya parahnya krisis pangan tersebut (Crossing Borders, 2019). Lambannya pengakuan pemerintah terhadap kelaparan, yang sering disalahkan pada faktor eksternal seperti

sanksi dan Amerika Serikat, menghambat upaya bantuan internasional (Noland, 2007).

Akibat dari rangkaian faktor ini adalah kelaparan massal yang diperkirakan merenggut nyawa antara 600.000 hingga 3 juta orang, dengan banyak lagi yang menderita malnutrisi dan masalah kesehatan terkait (Haggard & Noland, 2001). Struktur sosial negara terganggu parah, dengan keluarga-keluarga yang terpisah dalam pencarian makanan, bahkan ada laporan tentang tindakan ekstrim seperti kanibalisme (Smith, 2015).

Pada akhir tahun 1990-an, organisasi internasional mulai memberikan bantuan pangan, tetapi keengganan pemerintah Korea Utara untuk bekerja sama sepenuhnya mempersulit upaya bantuan (WFP, 2000). Pemerintah juga mengontrol distribusi bantuan, seringkali memprioritaskan kelompok-kelompok yang loyal kepada rezim dan mengabaikan daerah-daerah yang dianggap kurang mendukung.



Gambar 2.2. Fenomena Kelaparan Arduous March di Korea Utara

Sumber: (IST 400 E-Portfolio, 1997)

Pengalaman Arduous March meninggalkan trauma mendalam yang terus mempengaruhi kebijakan Korea Utara hingga saat ini, terutama dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Hingga saat ini, pengalaman Arduous March masih menjadi referensi dalam kebijakan domestik dan retorika pemerintah, digunakan untuk menanamkan ketahanan nasional dan loyalitas kepada rezim yang berkuasa (United Nations, 2019). Trauma kolektif dari Arduous March ini sangat memengaruhi cara negara tersebut merespons krisis, membentuk pendekatan yang sangat tertutup dan defensif terhadap pandemi. Hal ini terlihat dari keputusan Korea Utara menjadi salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya secara total pada awal 2020, sebuah tindakan

yang mengingatkan pada isolasi yang memperburuk kelaparan di tahun 1990-an (W, C, 2023).

Selain itu, fokus rezim pada industri berat mengalihkan sumber daya dari sektor pertanian, menyebabkan teknik pertanian yang usang dan infrastruktur yang tidak memadai (Haggard & Noland, 2001). Sistem distribusi pangan yang sentralistik dan birokratis juga menjadi masalah besar, dengan prioritas diberikan kepada kelompok tertentu seperti militer dan pejabat pemerintah, sementara masyarakat umum, terutama di daerah pedesaan, seringkali tidak mendapatkan jatah yang cukup (Susanto, 2021). Gangguan impor pangan akibat bencana alam, sanksi internasional, atau kebijakan penutupan perbatasan (seperti selama pandemi COVID-19) semakin memperparah krisis (Susanto, 2021). Penutupan perbatasan akibat pandemi COVID-19 ini memiliki dampak langsung pada ekonomi Korea Utara yang sudah tertekan. Perdagangan dengan Tiongkok, mitra dagang utama dan sumber bantuan vital, menurun drastis, menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis pangan (Lee, 2022).

Isolasi politik akibat kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan program nuklir yang kontroversial juga memperburuk keadaan. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan PBB membatasi akses Korea Utara terhadap perdagangan internasional, termasuk impor bahan pangan, pupuk, dan peralatan pertanian (Manyin & Nikitin, 2014). Pembatasan bantuan kemanusiaan juga mempersulit penyaluran bantuan makanan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan (Human Rights Watch, 2020).

Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, menekankan kemandirian dan "perjuangan keras" (arduous struggle) dalam menghadapi pandemi, sebuah narasi yang secara langsung merujuk pada Arduous March. Retorika ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat dan memperkuat kontrol negara, tetapi juga mengisyaratkan potensi kesulitan yang akan datang. Alih-alih mencari bantuan internasional secara terbuka, Korea Utara lebih memilih untuk mengandalkan sumber daya internal dan langkah-langkah pencegahan yang ketat. Informasi tentang situasi sebenarnya di dalam negeri sangat terbatas, dan klaim resmi tentang keberhasilan dalam mengatasi pandemi sulit diverifikasi secara independen (KCNA, 2022).

Namun, laporan dari organisasi kemanusiaan dan pembelot menunjukkan adanya peningkatan kerawanan pangan dan kesulitan ekonomi (Daily NK, 2021). Respons Korea Utara terhadap COVID-19 dapat dilihat sebagai cerminan dari trauma Arduous March. Ketakutan akan keruntuhan sistem, kelaparan massal, dan campur tangan asing mendorong pendekatan yang mengutamakan kontrol, isolasi, dan kemandirian, bahkan dengan mengorbankan potensi bantuan dan kerjasama internasional. Meskipun kelaparan mereda seiring dengan meningkatnya bantuan internasional dan adaptasi ekonomi masyarakat, dampaknya tetap terasa dalam aspek sosial dan politik Korea Utara.

2.2 Anggaran dan Pendanaan Ketahanan Pangan Korea Utara

Krisis pangan yang semakin memburuk di Korea Utara telah mendorong Program Pangan Dunia (WFP) untuk meningkatkan pendanaan bagi program bantuan pangan di negara tersebut. Pada awal tahun 2023, WFP mengajukan peningkatan anggaran hingga tiga kali lipat untuk Korea Utara guna mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang semakin parah. Organisasi ini memperingatkan bahwa tanpa tambahan sumber daya, negara tersebut berisiko mengalami kelaparan besar-besaran. Menurut WFP, tingkat ketahanan pangan di Korea Utara saat ini merupakan yang terburuk sejak tahun 1990-an, periode di mana negara tersebut mengalami kelaparan massal yang menyebabkan kematian ratusan ribu orang.

Sebagai bagian dari respons terhadap krisis ini, WFP memperpanjang rencana bantuan pangan untuk Korea Utara hingga akhir tahun 2024. Anggaran proyek ini meningkat dari 214,9 juta dolar AS menjadi 247,7 juta dolar AS, dengan target penerima manfaat yang bertambah dari 4,4 juta menjadi 5,2 juta orang. Perubahan ini bertujuan untuk memungkinkan WFP melanjutkan operasinya setelah staf internasional kembali ke Korea Utara guna menilai kondisi ketahanan pangan dan mengimplementasikan program bantuan secara langsung.

Di tengah upaya bantuan pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional, pemerintah Korea Utara tetap mengalokasikan anggaran

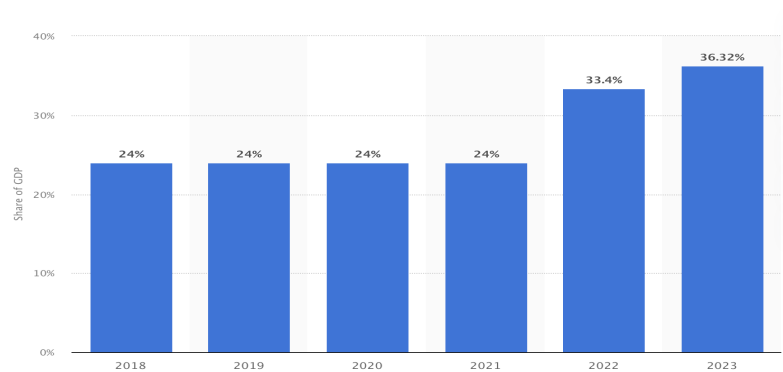
yang signifikan untuk sektor pertahanan dan kerja sama militer dengan negara lain. Pada akhir Januari 2024, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, secara terbuka mengakui kegagalannya dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di daerah pedesaan, termasuk bahan pangan dan barang konsumsi lainnya. Pernyataan ini muncul di tengah kondisi ekonomi pedesaan yang semakin memburuk, dimana sebagian besar dari 9,66 juta penduduk di wilayah tersebut mengalami kelaparan.

Meskipun menghadapi krisis pangan yang parah, rezim Korea Utara tetap mengalokasikan sumber daya yang besar untuk belanja militer. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pengeluaran militer negara ini mencapai lebih dari 36% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu negara dengan proporsi anggaran pertahanan terbesar di dunia. Selain itu, laporan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada Februari 2024 mengonfirmasi bahwa banyak warga Korea Utara yang tidak menerima jatah pangan dari pemerintah dan bergantung pada pasar informal untuk bertahan hidup.

Prioritas rezim Korea Utara dalam membangun ekonomi berbasis pertahanan telah mengorbankan pengembangan sektor lain, termasuk produksi pangan, standar hidup, dan hak asasi manusia. Sejarah ekonomi negara ini menunjukkan periode stagnasi dan krisis yang berkepanjangan, dengan hanya sedikit fase pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun PDB Korea Utara meningkat sebesar 3% pada tahun 2023 setelah mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut, kondisi

infrastruktur, standar hidup, dan kesejahteraan masyarakat tetap memburuk.

Grafik 2.1. Pengeluaran militer sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) di Korea Utara dari tahun 2018 hingga 2023



Sumber: (Statista, 2024)

Berdasarkan laporan dari World Military Expenditures and Arms Transfers tahun 2019, Korea Utara mengalokasikan antara 21,9% hingga 24,4% dari PDB-nya untuk belanja militer dalam kurun waktu 2007–2017 (*North Korea*, 2020). Pada tahun 2022, pengeluaran ini meningkat hingga hampir 16% dari PDB, dan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 36% (*Lee*, 2024). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki proporsi pengeluaran militer besar. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan jauh lebih kecil, dengan sebagian besar bantuan pangan berasal dari organisasi internasional dan mitra dagang seperti Cina.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah Korea Utara untuk lebih memprioritaskan belanja militer dibandingkan dengan ketahanan pangan telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara

tersebut. Dengan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengembangan persenjataan dan kerja sama militer, rakyat Korea Utara terus menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, analisis mengenai distribusi anggaran negara ini menjadi penting dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

2.3 Dampak Krisis Pangan Korea Utara

Gizi kronis dan ketahanan pangan di Korea Utara masih menjadi masalah kritis yang berakar dalam pada tantangan pertanian historis serta isolasi politik negara tersebut. Penduduk menghadapi kekurangan pangan yang parah, diperburuk oleh berbagai faktor seperti bencana alam, salah urus ekonomi, dan sanksi internasional, yang pada akhirnya menyebabkan malnutrisi dan pertumbuhan terhambat, khususnya di kalangan anak-anak. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), "lebih dari 40% populasi Korea Utara mengalami kekurangan gizi akibat akses terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai" (Program Pangan Dunia, n.d.). Dalam beberapa tahun terakhir, ketersediaan pangan di Korea Utara mengalami penurunan signifikan. Laporan menunjukkan bahwa krisis pangan yang dialami negara ini telah mencapai titik terburuk sejak kelaparan besar pada 1990-an. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah praktik pertanian yang ketinggalan zaman, akses terbatas ke teknologi modern, serta minimnya investasi dalam sektor

pertanian. *Georgetown Journal of International Affairs* mencatat bahwa "meskipun ada perbaikan dalam produksi biji-bijian sejak era 1990-an, negara ini masih gagal memenuhi kebutuhan gizi penduduknya, dengan banyak warga yang harus bergantung pada pola makan terbatas yang didominasi oleh beras dan jagung" (*Georgetown Journal of International Affairs*, 2023).

Selain itu, pemerintah Korea Utara lebih memprioritaskan pengeluaran militer dibandingkan reformasi pertanian dan bantuan kemanusiaan. Hal ini semakin memperparah masalah ketahanan pangan karena alokasi sumber daya yang terbatas tidak diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan domestik. Berdasarkan laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*, Korea Utara mengalami tantangan serius dalam ketahanan pangan dan gizi masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi di negara tersebut meningkat dari 34,3% menjadi 45,5% dalam periode tertentu, mengindikasikan memburuknya akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.



Gambar 2.3. Anak Anak di Korea Utara Kekurangan Gizi Kronis dan Mengalami Malnutrisi

Sumber: (WFP, Gerald Bourke, 2004)

Selain itu, prevalensi ketidakamanan pangan, baik dalam kategori sedang maupun parah, meningkat dari 68,9% menjadi 71,4%, dengan tingkat ketidakamanan pangan yang parah melonjak signifikan dari 2,5% menjadi 25,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka, baik akibat keterbatasan produksi dalam negeri, keterbatasan akses impor, maupun dampak sanksi ekonomi internasional yang memperparah situasi. Gambar 2.3 mencerminkan salah satu kondisi anak di Korea Utara yang sedang kekurangan gizi, tetapi diberikan asupan makanan dari ibunya yang berasal dari bantuan World Food Program. Terdapat laporan UNICEF pada tahun 2013 menyoroti bahwa 27,9 persen

anak-anak di bawah usia 5 tahun di Korea Utara mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi (UNICEF, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi buruk telah mempengaruhi generasi muda, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan mereka.

Kelaparan berkepanjangan di Korea Utara telah menyebabkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan fisik penduduknya. Salah satu indikator utama adalah perbedaan tinggi badan antara warga Korea Utara dan Korea Selatan. Menurut data dari Badan Korea untuk Teknologi dan Standar (KATS) pada tahun 2022, rata-rata tinggi pria Korea Selatan adalah 172,5 cm, sementara wanita mencapai 159,6 cm (KBS World Indonesia, 2022). Sebagai perbandingan, penelitian yang mengukur tinggi badan orang Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan menunjukkan bahwa rata-rata tinggi pria dewasa adalah 165 cm dan wanita 154 cm (Lee, 2021). Perbedaan ini mencerminkan dampak kekurangan gizi dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung di Korea Utara terhadap pertumbuhan fisik penduduknya.

Marcus Noland, Wakil Presiden Eksekutif dan Direktur Studi di Peterson Institute for International Economics, menyatakan bahwa hambatan pertumbuhan pada usia dini memiliki konsekuensi fisik dan mental seumur hidup yang tidak dapat dipulihkan (Crossing Borders NK, 2019). Hal ini menekankan pentingnya penanganan masalah gizi dan

kesehatan di Korea Utara untuk mencegah dampak negatif jangka panjang pada penduduknya.

Sebagai negara yang dikategorikan sebagai *low-income food-deficit country* (LIFDC), Korea Utara menghadapi keterbatasan struktural dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Status ini mencerminkan ketergantungan negara terhadap impor pangan serta lemahnya kapasitas produksi domestik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Faktor-faktor seperti sistem pertanian yang kurang berkembang, perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen, serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif turut berkontribusi terhadap krisis pangan yang berkepanjangan. Lebih lanjut, isolasi politik dan ekonomi yang diterapkan pemerintah Korea Utara semakin memperburuk situasi, menghambat akses terhadap bantuan kemanusiaan dan suplai pangan yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, krisis ketahanan pangan di Korea Utara tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi secara keseluruhan, berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya pangan.

Kekurangan pangan kronis di Korea Utara menjadi krisis kemanusiaan yang mendalam, diperburuk oleh kebijakan sistemik yang lebih mengutamakan kendali politik dibandingkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan sengaja menciptakan kelaparan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan otoriternya. Distribusi pangan yang

dikendalikan negara lebih mengutamakan kelompok militer dan elite, sementara warga biasa, terutama yang tinggal di pedesaan, harus bertahan dalam kondisi kekurangan gizi kronis dan kelaparan massal secara berkala. Kesaksian para pembelot menggambarkan pengalaman mengerikan saat kelaparan, di mana individu terpaksa mencari makan dari kulit kayu dan rumput agar tetap bertahan hidup, sementara sumber daya pemerintah dialihkan untuk mempertahankan ketertiban politik yang ketat dan ekspansi militer.

Laporan lain mengungkapkan kondisi mengerikan yang dialami oleh para pekerja Korea Utara yang dipaksa bekerja di armada perikanan Cina. Para pekerja ini, yang dikirim atas perintah pemerintah, harus menghadapi kondisi berat di laut selama bertahun-tahun, bahkan hingga satu dekade, tanpa kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Upah mereka hampir seluruhnya disita oleh pemerintah Korea Utara, membuat mereka terperangkap dalam kondisi kerja paksa yang terus-menerus (The Guardian, 2025) . Bentuk eksploitasi ini tidak hanya melanggar hak-hak ketenagakerjaan internasional, tetapi juga menjadi pelanggaran terhadap sanksi global yang diberlakukan terhadap Korea Utara. Banyak dari pekerja ini mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang ekstrem, termasuk kekurangan gizi, kelelahan, dan pelecehan, yang semakin menegaskan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim =.

Kebijakan pemerintah Korea Utara juga menyebabkan kemerosotan layanan kesehatan yang parah, dengan rumah sakit dan klinik yang kekurangan peralatan, tenaga medis, serta obat-obatan penting. Penyakit akibat kekurangan gizi, penyakit menular, dan kondisi yang seharusnya dapat dicegah tetap merajalela, terutama di kalangan anak-anak dan lansia. Sementara itu, kerja paksa tetap menjadi realitas yang mengerikan, di mana bahkan anak-anak dipaksa bekerja di bawah instruksi negara. Pabrik, tambang, dan proyek pertanian di pedesaan dipenuhi oleh individu yang dipaksa bekerja dengan sedikit atau tanpa imbalan, dalam kondisi yang sangat berbahaya. Penahanan sewenang-wenang terhadap para pengkritik pemerintah dan mereka yang dicurigai tidak setia tetap menjadi perhatian utama, dengan para tahanan mengalami penyiksaan, kelaparan, dan kondisi tidak manusiawi di pusat-pusat penahanan (Amnesty International, 2023). Selain itu, warga Korea Utara yang melarikan diri ke luar negeri untuk mencari perlindungan menghadapi ancaman besar untuk dipulangkan secara paksa oleh negara-negara tetangga, hanya untuk mengalami hukuman brutal setelah kembali, termasuk eksekusi atau pemenjaraan tanpa batas di kamp-kamp penjara politik.

WFP menyatakan bahwa "sanksi internasional semakin mempersempit ruang bagi impor bahan pangan dan teknologi pertanian, memperburuk kondisi produksi pangan dalam negeri" (Program Pangan Dunia, n.d.). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar

terhadap rantai pasokan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Pembatasan ketat yang diterapkan oleh pemerintah Korea Utara menghambat arus masuk bantuan dari luar negeri, sehingga semakin banyak penduduk yang mengalami kelaparan. *Georgetown Journal of International Affairs* mencatat bahwa "penutupan perbatasan dan pembatasan impor selama pandemi telah memperburuk situasi pangan di Korea Utara, dengan laporan yang menunjukkan peningkatan tajam dalam angka kelaparan" (*Georgetown Journal of International Affairs*, 2023). Untuk mengatasi permasalahan gizi kronis ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan praktik pertanian modern, kerja sama internasional dalam penyediaan bantuan pangan, serta reformasi kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, ketahanan pangan di Korea Utara dapat ditingkatkan dan masalah gizi kronis yang telah lama menghantui negara ini dapat diminimalkan secara efektif.

2.4. Strategi Korea Utara dalam Menjaga Ketahanan Pangan

2.4.1. Kebijakan Domestik dalam Menangani Ketahanan Pangan

Pada prinsipnya Korea Utara menanamkan prinsip *Juche* (주체사상) yang berarti kemandirian dan menekankan kedaulatan nasional dan kemandirian dalam bidang ekonomi (Sasmita, 2018). *Juche* merupakan ideologi resmi Korea Utara yang menekankan prinsip

kemandirian dalam politik, ekonomi, dan militer. Diperkenalkan oleh Kim Il Sung, ideologi ini menggabungkan unsur Marxisme, nasionalisme Korea, dan nilai-nilai Konfusianisme (Britannica, 2018). Juche digunakan untuk membangun legitimasi kepemimpinan dinasti Kim, dengan pemimpin negara dianggap sebagai figur ilahi yang mutlak. Negara mengkultuskan pemimpin melalui propaganda, ritual penghormatan, dan narasi bahwa hanya pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk membawa Korea Utara menuju kejayaan. Hal ini membuat pemimpin memiliki otoritas absolut dalam semua aspek kehidupan rakyat. Dalam perkembangannya, Juche telah beradaptasi dengan kebutuhan politik Korea Utara, seperti melalui kebijakan songun (선군) yang berarti militer yang pertama dan byungjin (병진) yaitu pengembangan ekonomi dan militer secara bersamaan (Beauchamp, 2018). Di era modern, Juche tetap menjadi alat propaganda yang memperkuat kontrol rezim, meskipun tantangan globalisasi dan krisis ekonomi memaksa Korea Utara untuk sedikit membuka diri terhadap dunia luar.



Gambar 3.1. Menara Juche di Pyongyang, di Korea Utara

Sumber: (Tripadvisor, 2019)

Dalam menjalankan kebijakan pangan, pemerintah Korea Utara menerapkan kontrol ketat terhadap produksi pertanian dan distribusi pangan melalui Sistem Distribusi Publik (Public Distribution System/PDS). Sistem ini mendistribusikan jatah pangan kepada penduduk berdasarkan loyalitas politik, jenis pekerjaan, serta klasifikasi wilayah tempat tinggal (Munich Personal RePEc Archive, 2024). Bagi sebagian besar warga negara Korea Utara, sistem distribusi publik tidak lagi menjadi sumber pangan yang dapat diandalkan sejak peristiwa kelaparan besar. Akibatnya, pemerintah tidak mampu sepenuhnya memberantas produksi dan perdagangan pangan secara swasta. Sistem PDS hampir kolaps, menyebabkan banyak warga beralih ke pasar gelap dan sistem perdagangan informal untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Tanpa

sistem distribusi publik yang berfungsi dengan baik, penghapusan sektor swasta dalam produksi dan perdagangan pangan justru akan memperburuk kondisi rakyat (Hagard dan Noland, 2022).

Berdasarkan laporan terbaru dari media resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pemerintah Korea Utara telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan, meskipun data eksplisit mengenai kondisi pangan nasional masih jarang diungkapkan. Salah satu langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara adalah melalui kebijakan *Regional Development 20×10 Policy*, yang bertujuan untuk memodernisasi setidaknya 20 wilayah pedesaan setiap tahunnya selama satu dekade ke depan (Shin, 2024). Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya kurang berkembang. Dalam laporannya, KCNA menyebutkan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menekankan pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan, ilmiah, dan pendidikan di daerah pedesaan. Peningkatan infrastruktur ini dipandang sebagai faktor kunci dalam mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kondisi ketahanan pangan di negara tersebut.

Selain itu, modernisasi pabrik-pabrik di berbagai wilayah juga menjadi salah satu langkah yang dianggap dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam sektor pengolahan pangan (Shin, 2024). Meski demikian, KCNA tidak memberikan informasi langsung mengenai apakah pabrik-pabrik ini akan difokuskan pada produksi makanan atau lebih bersifat industri umum. Dalam upaya lain untuk meningkatkan ketersediaan pangan, Korea Utara telah meresmikan *Sinpho City Offshore Farm*, sebuah proyek akuakultur yang bertujuan untuk membudidayakan berbagai produk laut seperti kerang, rumput laut, teripang, dan bulu babi (Reuters, 2024). Proyek ini diinisiasi dalam waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam lima bulan, dan dipuji oleh Kim Jong Un sebagai contoh keberhasilan transformasi regional yang dapat diadopsi secara lebih luas di seluruh negeri.

Pengembangan sektor perikanan ini menandakan bahwa pemerintah Korea Utara sedang berusaha mencari sumber pangan alternatif di tengah tantangan produksi pertanian yang mungkin terhambat oleh faktor cuaca atau keterbatasan lahan subur. Dengan hasil laut yang lebih stabil dan dapat diproduksi dalam skala besar, diharapkan tekanan terhadap ketahanan pangan nasional dapat berkurang.

2.4.2. Peran Pemerintah dan Militer dalam Distribusi Pangan

Militer memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem distribusi pangan di Korea Utara. Sebagai salah satu pilar utama dalam ideologi Songun (Militer Didahulukan), militer seringkali mendapatkan prioritas dalam alokasi sumber daya, termasuk pangan. Selama masa-masa

sulit, pemerintah kerap mengalihkan pasokan pangan dari warga sipil ke militer demi menjaga stabilitas dan kekuatan pertahanan negara. Tentara Rakyat Korea (Korean People's Army/KPA) tidak hanya berfungsi sebagai penerima utama bantuan pangan negara, tetapi juga memainkan peran dalam produksi dan distribusi pangan. Banyak unit militer yang memiliki ladang pertanian sendiri, yang disebut pertanian militer, untuk memastikan pasokan makanan yang cukup bagi anggotanya. Selain itu, tentara juga bertanggung jawab atas pengelolaan logistik pangan dan keamanan distribusi, yang sering kali menyebabkan praktik distribusi yang tidak adil di mana hanya mereka yang memiliki hubungan dekat dengan militer atau Partai Buruh yang mendapatkan akses lebih baik terhadap bahan makanan.



**Gambar 3.2. Presiden Kim Jong Un Memeriksa Produksi Pangan
Jagung yang Ada di Korea Utara**

Sumber: (Korea Central News Agency (KCNA), 2016)

Pemerintah Korea Utara menerapkan sistem distribusi berbasis Public Distribution System (PDS), yang bertujuan untuk mengatur konsumsi pangan rakyat. Namun, sistem ini sering kali gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Pada masa krisis pangan, pasokan dalam PDS sering kali dialihkan ke militer atau elite politik, sehingga masyarakat umum harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Salah satu dampak dari sistem distribusi yang dikontrol oleh pemerintah dan militer adalah ketimpangan akses terhadap pangan. Masyarakat Pyongyang dan pejabat memiliki posisi politik atau militer yang tinggi cenderung mendapatkan akses yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang berada di daerah pedesaan (Natsios, 1990). Wilayah-wilayah yang dianggap kurang strategis sering mengalami kelaparan berkepanjangan akibat distribusi yang tidak merata. Di tengah ketidakmampuan negara dalam menjamin distribusi pangan yang merata, masyarakat mulai bergantung pada pasar gelap dan perdagangan ilegal untuk mendapatkan makanan. Fenomena ini melahirkan *jangmadang* (장마당), yaitu pasar informal yang menjadi pusat perdagangan pangan bagi masyarakat umum. Meskipun pemerintah berusaha menekan keberadaan pasar ini melalui kebijakan represif, *jangmadang* (장마당) tetap berkembang sebagai mekanisme bertahan hidup yang tidak dapat diabaikan (Park, 2019). Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pasar ini mulai berperan dalam membentuk ekonomi informal yang semakin besar,

memungkinkan rakyat untuk mendapatkan bahan makanan di luar sistem distribusi negara.

Selain itu, ketergantungan Korea Utara pada bantuan pangan internasional juga memperjelas bagaimana pemerintah dan militer mengendalikan akses terhadap sumber daya makanan. Bantuan dari PBB dan negara-negara seperti China sering kali tidak sampai kepada rakyat yang paling membutuhkan, melainkan dialokasikan ulang untuk kepentingan elite politik dan militer. Manipulasi bantuan ini tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat biasa, tetapi juga memperkuat sistem ketidakadilan dalam distribusi pangan yang berakar dalam kebijakan negara (Park, 2019). Sehingga pemerintah dan militer Korea Utara memainkan peran utama dalam distribusi pangan, tetapi dengan tujuan utama menjaga stabilitas rezim daripada kesejahteraan rakyat. Militer mendapatkan prioritas dalam alokasi pangan, sementara rakyat biasa harus bergantung pada mekanisme alternatif seperti jangmadang (장마당) untuk bertahan hidup. Sistem distribusi yang dikendalikan secara ketat ini menciptakan ketimpangan besar dalam akses pangan, di mana mereka yang memiliki koneksi dengan rezim menikmati perlakuan istimewa, sementara mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan harus berjuang di tengah ketidakpastian dan kelaparan.